

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Pada konflik sosial di Desa Kinipan diakibatkan izin HGU yang terbit tanpa melalui sosialisasi dengan masyarakat sehingga PT. SML selaku pemegang izin menggarap sesuai konsesi yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Namun, izin konsesi berbenturan dengan hutan adat yang sah dimiliki oleh masyarakat adat setelah resmi didaftarkan pada BRWA sehingga konflik yang terjadi pada Desa Kinipan belum menemui titik temu.

Pada aktor yang terlibat terjalin konflik kepentingan antara H. Abdul Rasyid terhadap PT. SML yang secara data MD Universe merupakan anak Perusahaan CBI Group yang dimiliki oleh H. Abdul Rasyid. Kemudian Bupati Kabupaten Lamandau Hendra Lesmana selaku pemilik PT. TSA memiliki keterkaitan dengan PT. TSA adalah salah satu anak perusahaan CBI Group serta menjadikan Kabupaten Lamandau tertutup akses publik terkait konflik sosial pada Desa Kinipan.

Konflik sosial juga berdampak pada lingkungan Desa Kinipan yang rawan bajir kemudian masyarakat menjadi tertutup terhadap pihak asing bahkan menimbulkan resistensi masyarakat pada pihak lain. Konflik sosial juga menghadirkan solidaritas antar masyarakat di Desa Kinipan menjadi semakin kuat dengan sama-sama menjaga hutan adat yang masih tersisa. Serta konflik sosial menghadirkan dampak budaya yang mulanya masyarakat Kinipan masih berpikir konservatif dipaksa transisi menjadi masyarakat modern oleh pemerintah daerah.

## **4.2 Saran**

Saran penulis setelah melakukan penelitian terhadap konflik sosial berupa perlunya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat khususnya Kinipan terkait produk kebijakan yang akan diterapkan. Kegagalan komunikasi publik juga mengakibatkan pemerintah daerah tidak mengetahui kehendak masyarakat Kinipan yang sesungguhnya sehingga pemerintah daerah juga perlu melakukan pengkajian sebelum mengesahkan sebuah kebijakan. Dalam hal ini masyarakat Kinipan dibantu oleh LSM untuk mengadvokasi konflik yang terjadi dengan harapan mereka operasi PT. SML dapat berhenti dan membiarkan masyarakat Kinipan hidup dengan hutan adat mereka. Sehingga dalam konflik perlu adanya pendekatan resoliansi, rehabilitasi dan rekonstruksi pada lingkungan Kinipan.